



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 23 Januari 2017

Kepada Yth :

1. Camat Se. Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Wali Nagari Se Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pimpinan Puskesmas Se Kabupaten Pesisir Selatan.

Di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 800/ 076 /BPT-PS/I/2017
TENTANG
PELAKSANAAN NAGARI SIAGA AKTIF

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam rangka mendukung pencapaian visi Pembangunan Nasional 2005 – 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, telah ditetapkan Program Pengembangan Desa Siaga. Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Pesisir Selatan, dihimbau kepada saudara :

1. Bahwa Desa/Nagari siaga aktif merupakan :
 - pengembangan dari Desa/Nagari siaga yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos kesehatan Desa/Nagari atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu.
 - Penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan Surveilans berbasis masyarakat meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan Bencana serta penyehatan lingkungan melalui pembinaan oleh Perangkat Nagari dan Petugas Puskesmas, sehingga masyarakatnya hidup bersih dan sehat (PHBS).
2. Desa/Nagari siaga aktif mempunyai komponen
 - Pelayanan Kesehatan Dasar melalui pembinaan dan kerjasama dengan petugas Puskesmas setempat.
 - Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorong upaya Pengamatan (surveilans) berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.
 - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
3. Agar Pemerintah Kecamatan dan Nagari berperan aktif dalam melakukan pengembangan Desa/ Nagari menjadi desa/Nagari Siaga Aktif sesuai dengan kriteria desa/ Nagari siaga Aktif di wilayah masing – masing.
4. Kriteria Desa/Nagari siaga aktif meliputi :
 - Kepedulian Pemerintahan desa/nagari dan pemuka masyarakat terhadap desa/nagari siaga aktif yang tercermin dari keberadaan dan keaktifan Forum Desa/Nagari.

- Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan desa/nagari siaga aktif sesuai dengan pentahapan desa/nagari siaga aktif di masing – masing wilayah.
 - Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka dan memberikan pelayanan setiap hari di Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pos Kesehatan Nagari.
 - Keberadaan UKBM yang dilakukan pembinaan oleh Petugas Puskesmas setempat, yang selanjutnya dapat melaksanakan :
 - a. Pengamatan (Surveilans) berbasis masyarakat
 - b. Kedaruratan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana
 - c. Penyehatan Lingkungan.
 - Tercakupnya Pendanaan untuk pengembangan Desa/Nagari siaga aktif dalam anggaran pembangunan desa/nagari serta dari masyarakat dan dunia usaha.
 - Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di desa/ nagari siaga aktif.
 - Peraturan didesa/nagari yang melandasi tentang pengembangan desa / nagari siaga aktif.
 - Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
5. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui tenaga Promosi Kesehatan dalam meningkatkan pembinaan UKBM dan desa/Nagari siaga aktif di wilayah kerja masing – masing.
6. Meningkatkan pengembangan kegiatan Inovatif di Kecamatan dan Nagari dalam percepatan terwujudnya Desa/ Nagari siaga aktif di wilayah masing – masing dengan upaya – upaya seperti :
- Pembuatan Regulasi/ Peraturan Nagari Tentang pengembangan Desa/Nagari siaga aktif di masing – masing wilayah.
 - Membantu memfasilitasi para kader desa/nagari siaga aktif, agar kader dapat bekerja sesuai dengan fungsinya didalam pengembangan desa siaga aktif.
 - Menganggarkan melalui dana Desa/Nagari untuk pengembangan desa siaga aktif dan UKBM lainnya sesuai dengan karakteristik masing – masing Nagari.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing – masing nagari terkait dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Demikianlah hal ini disampaikan kepada saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PESISIR SELATAN

H.HENDRAJONI,SH,MH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsip.....